



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban bagi setiap Dinas/Badan/Lembaga (SKPD) yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, guna mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim telah menetapkan Visi, Misi dan Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim berdasarkan Visi, Misi, Renstra dan Program Kerja 2015 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika meliputi pengembangan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi, peningkatan sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif, pengembangan infrastruktur bidang kominfo, penelitian dan pengembangan aplikasi yang handal dan berkualitas, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum bidang kominfo sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dibuat tentunya diharapkan selain sebagai upaya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kaltim ke depan, agar terwujudnya KALTIM MAJU 2018 sebagaimana diharapkan Gubernur dalam program kerja kedepan serta pembangunan masyarakat Kaltim yang lebih baik dan sejahtera.



Demikian kata pengantar ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan dan langkah-langkah lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Samarinda, Februari 2016
Kepala Dinas,

Abdullah Sani, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1 028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM.....	4
B. GAMBARAN UMUM.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	10
E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	11
F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
BAB II. PPROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM DAN KEGIATAN	15
A. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL	23
C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	24
D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	24
E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA	25
F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH	25
BAB III. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	27
BAB IV. TUGAS UMUM PEMERINTAH	28
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH	28
BAB V. PENUTUP	30
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN.....	30



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816).
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M. Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, tentang Pelayanan Publik.
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor Kep/26/M.Pan/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Gubernur Nomor : 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur.
25. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dibidang Komunikasi dan Informatika yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *Good Governance*. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan memprioritaskan peningkatan



kapasitas, percepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Di era keterbukaan saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan lebih memprioritaskan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan berbagai bukti dan mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance* melalui penerapan *e-Government*.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap publik secara efektif dan efisien serta interaktif, pada dasarnya pengisyaratan bentuk tuntutan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan sekaligus memperluas rentang kendali.

Dengan kata lain, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi kepada internal pemerintah dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam lingkup eksternal untuk pelayanan masyarakat (*public service*).

Dalam upaya mewujudkan implementasi *e-Government* cakupannya tidak hanya pada aspek teknis saja, akan tetapi mencakup aspek non teknis berupa komitmen dari pemerintah dan pucuk pimpinan institusi. Secara garis besar ada empat komponen pokok yang perlu terus didorong kesiapannya yakni infrastruktur (jaringan komunikasi dan informasi), konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi tersebut akan diolah dan disajikan secara online melalui portal www.kaltimprov.go.id ,



www.diskominfo.go.id dan www.wiekkaltimprov.go.id, selain itu diterbitkan pula melalui media cetak dalam bentuk penerbitan secara berkala.

Penerbitan media cetak secara berkala berfungsi sebagai bahan publikasi juga menjadi wadah berkreasi bagi aparat khususnya di lingkungan instansi pemerintah provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ide-ide kreatif berkaitan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengakses secara mudah dan cepat seluruh data dan informasi yang disajikan.

Ditahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode ke dua tahun 2014-2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menjadikan tahun 2015 sebagai salah satu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang mana dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan di Kalimantan Timur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

Subbag Umum

Subbag Perencanaan

Subbag Keuangan

c. Bidang Teknologi Informasi

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi

Seksi Kerjasama Teknologi Informasi

Seksi Pemberdayaan Informatika

d. Bidang Aplikasi dan Telematika

Seksi Aplikasi Teknologi



Seksi Telematika

Seksi Media Informasi

e. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Seksi Pos

Seksi Telekomunikasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi

f. Bidang Dokumentasi dan Informasi

Seksi Pengolahan Informasi

Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Seksi Pelayanan Pers

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pranata Humas

Pranata Komputer

**D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL**

Sekretariat

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	II.a	Pembina Utama Madya (IV/d)	S2	1
2	Sekretaris	III.a	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1
3	Kasubbag. Umum	IV.a	Penata Tk. I (III/d)	S1	1
	Kasubbag. Perencanaan	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
	Kasubbag. Keuangan	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
4	Staf Struktural		Pembina Tk.I (IV/b)	S1	1
			Pembina (IV/a)	S2	1
			Penata Tk.I (III/d)	S1	1
			Penata Muda Tk.I(III/b)	S1	1
			Penata Muda (III/a)	SI	1
			Penata Muda (III/a)	D3	1
			Penata Muda (III/a)	SLTA	1
			Pengatur Muda Tk.I (II/d)	D3	2
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA	1
			Pengatur Muda (II/a)	SLTP	1
TOTAL					19

Bidang Pos dan Telekomunikasi

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bidang	III.a	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1
2	Kasi. Telekomunikasi	IV.a	Penata Muda Tk.I (III/b)	S2	1
	Kasi. Pos	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
	Kasi. Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
3	Staf Struktural		Penata Muda (III/a)	S1	2
	Staf Fungsional		Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	1
TOTAL					7

Bidang Aplikasi dan Telematika

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bidang	III.a	Pembina (IV/a)	S2	1
2	Kasi. Aplikasi Teknologi	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Kasi. Telematika	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1



	Kasi. Media Informasi	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
3	Staf Struktural		Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	3
			Penata Muda Tk I (III/a)	S1	2
			Pengatur (II/c)	SLTA	1
	Staf Fungsional		Penata Muda (III/a)	S1	1
TOTAL					11

Bidang Dokumentasi dan Informasi

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bidang	III.a	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1
2	Kasi. Pengolahan Informasi	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Kasi. Publikasi Dokumentasi	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Kasi. Pelayanan Pers	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
3	Staf Struktural		Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Staf Fungsional		Penata Muda Tk I (III/b)	S1	2
TOTAL					7

Bidang Teknologi Informasi

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bidang	III.a	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1
2	Kasi. Pengembangan TI	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Kasi. Kerjasama TI	IV.a	Penata Tk.I (III/d)	S1	1
	Kasi. Pemberdayaan Informatika	IV.a	Pembina (IV/a)	S2	1
3	Staf Struktural		Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	1
			Penata Muda Tk. I(II/b)	S1	2
TOTAL					7

E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

“Visi”

“Terwujudnya Akses komunikasi dan informatika yang berkualitas di wilayah Kalimantan Timur.”

“Misi”

- a. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika public.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang berkualitas.

F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kominfo Kalimantan Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Faktor - faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

- ✓ SDM Teknis yang ada sudah berpengalaman.
- ✓ Perangkat hardware mendukung.
- ✓ Tersedianya perencanaan dalam mewujudkan infrastruktur jaringan computer dan telekomunikasi.
- ✓ Menjadi percontohan dalam keterbukaan informasi publik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- ✓ Jumlah SDM yang berpengalaman masih kurang.
- ✓ Belum optimalnya tugas dan fungsi jabatan fungsional
- ✓ Belum dimanfaatkannya fasilitas teknologi yang sudah ada oleh masyarakat.
- ✓ Prasarana kantor yang kurang memadai untuk membuat pelaynan satu atap.
- ✓ Belum tersedianya Data tentang indeks kepuasan masyarakat akan informasi pembangunan daerah.

c. Peluang (*opportunities*)

- ✓ Pesatnya perkembangan teknologi informasi.
- ✓ Masyarakat yang haus akan informasi.
- ✓ Dukungan besar dari Gubernur Kalimantan Timur dalam upaya perkembangan teknologi informasi di Kaltim.
- ✓ Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait khususnya Kementerian Kominfo RI dalam membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi.
- ✓ Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana telekomunikasi.



- ✓ Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur diperlukan oleh stakeholder dalam rangka regulasi.
- ✓ Koordinasi dengan stakeholder terkait yang semakin meningkat.
- ✓ Tiap SKPD memiliki system Informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

d. Ancaman (threats)

- ✓ Besarnya pagu anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi.
- ✓ Topologi daerah Kalimantan Timur sangat luas dan jarak dari daerah yang satu ke daerah yang lain jauh.
- ✓ Semakin besarnya tuntutan masyarakat didaerah akan infrastruktur telekomunikasi
- ✓ Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan infrastruktur di bidang Kominfo.
- ✓ Belum terorganisirnya system informasi yang dimiliki oleh tiap-tiap SKPD.
- ✓ Belum semua SKPD yang memberikan informasi pembangunan secara menyeluruh kepada masyarakat.
- ✓ Jaringan informasi didaerah belum terorganisir.

Dengan mengacu analisa diatas yaitu dengan memanfaatkan kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada maka berdasarkan penjabaran sasaran Dinas Kominfo Prov. Kalimantan timur dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi

- ✓ Meningkatkan indek pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
- ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah.
- ✓ Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi.



2. Arah Kebijakan

- ✓ Pengembangan sistem penyebaran informasi pembangunan daerah
- ✓ Evaluasi kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan di Kalimantan Timur.
- ✓ Membangun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang akses informasi masyarakat secara luas dengan menghilangkan daerah blankspot.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika periode 2013 – 2018. Adapun Program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
7. Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
8. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
9. Kerjasama informasi dengan mass media.
10. Pengadaan perangkat aplikasi dan telematika.
11. Peningkatan / pengembangan aparatur di bidang telematika.
12. Pembinaan dan pengembangan sumber daya kominfo.
13. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah.
14. Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika.
15. Pembinaan dan pengawasan sumber daya postel.
16. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
17. Integrasi Aplikasi
18. Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa
19. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur seperti tersebut di atas, maka program – program yang ada di implementasikan Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam bentuk kegiatan – kegiatan adalah sebagai berikut :



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat.
Output : Jumlah kegiatan surat menyurat 12 bulan
Outcome : Persentase kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan 51,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 bulan
Outcome : Persentase penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik terlaksana 78,12%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan
Outcome : Persentase kendaraan dinas yang terpelihara dan memiliki izin terlaksana 41,13%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Output : Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor 12 bulan
Outcome : Persentase terlaksananya kebersihan kantor yang dipelihara 99,31%
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
Output : Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor 12 bulan
Outcome : Persentase peralatan kantor yang dipelihara terlaksana 99,19%
- Penyediaan alat tulis kantor.
Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
Outcome : Persentase kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi 81,15%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
Outcome : Persentase kebutuhan cetakan dan penggandaan terlaksana 96,16%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Output : Terlaksananya pembelian komponen listrik 12 bulan
Outcome : Persentase kebutuhan komponen listrik yang tersedia terlaksana 97,29%
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Output : Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor terlaksana 98,95%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan

Outcome : Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia terlaksana 77,63%

- Penyediaan makanan dan minuman.

Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor 12 bulan

Outcome : Persentase kebutuhan makan dan minum yang terlaksana 87,31%

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah antar lembaga terkait 12 bulan

Outcome : Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait di luar daerah terlaksana 96,79%

- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah antar lembaga terkait 12 bulan

Outcome : Meningkatnya komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan bimbingan terhadap lembaga terkait di dalam daerah terlaksana 99,98%

- Penyediaan jasa tenaga tertentu.

Output : Tersedianya jasa pegawai pengamanan aset dan kantor 12 bulan

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika terlaksana 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Output : Pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja

Outcome : Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor terlaksana 98,49%

- Pengadaan peralatan gedung kantor.

Output : Tersedianya peralatan penunjang kegiatan 1 tahun

Outcome : Meningkatnya efektifitas kerja dengan pemanfaatan peralatan kantor terlaksana 97,56%

- Pengadaan mebeleur.

Output : Terlaksananya pembelian mebeleur kantor 1 tahun

Outcome : Persentase kecukupan mebeleur penunjang kegiatan terlaksana 86,13%

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Output : Terlaksananya pemeliharaan secara berkala gedung kantor 1 tahun

Outcome : Persentase peningkatan dengan dukungan prasarana yang representative terlaksana 98,71%

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 tahun

Outcome : Persentase peningkatan efektifitas kerja dengan tersedianya sarana mobilisasi yang memadai terlaksana 99,83%

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun

Outcome : Persentase peningkatan efektifitas kerja dengan pemanfaatan perlengkapan gedung yang terpelihara terlaksana 98,94%

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 tahun

Outcome : Persentase peningkatan efektifitas kerja dengan pemanfaatan peralatan gedung yang terpelihara terlaksana 99,08%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Output : Tersedianya pakaian dinas untuk karyawan 98 stel

Outcome : Persentase tersedianya pakaian dinas untuk karyawan terlaksana 95,22 %

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Output : Tersedianya pakaian hari tertentu untuk karyawan 49 stel

Outcome : Persentase tersedianya pakaian hari tertentu untuk karyawan terlaksana 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Output : Terlaksananya kegiatan pendidikan formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 tahun

Outcome : Persentase peningkatan kualitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim terlaksana 77,85%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 tahun
Outcome : Persentase meningkatnya kinerja instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan terlaksana 89,27%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
Output : Terbinanya dan berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi, meningkatnya aksesibilitas jaringan Teknologi Informasi (TI) Kaltim dan Kab/Kota serta terpeliharanya infrastruktur jaringan, hardware, software dan peralatan pendukung lainnya 1 tahun
Outcome : Meningkatnya integritas dan percepatan kinerja aparatur pemerintah Kaltim yang berbasis jaringan Teknologi Informasi terlaksana 89,15%
- Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP).
Output : Terlaksananya kegiatan Mobile Community Access Point 1 tahun
Outcome : Terwujudnya masyarakat informasi terhadap internet sehat dan aman terlaksana 93,39%
- Pusat layanan informasi.
Output : Terlaksananya kegiatan call center dan contact center Provinsi Kalimantan Timur 1 tahun
Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kinerja pemerintah dengan adanya peran aktif masyarakat melalui media call center dan contact center terlaksana 93,77%

Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi

- Pembinaan standarisasi aplikasi / software legal.
Output : Jumlah laporan monitoring pembinaan standarisasi aplikasi / software legal
Outcome : Penggunaan perangkat lunak legal di SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota terlaksana 89,11%



Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

- Pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika.
Output : Terselenggaranya pelatihan dasar penggunaan aplikasi/software legal dalam menunjang kegiatan tata kelola pemerintahan di lingkup aparatur pemprov Kaltim dan masyarakat 1 tahun
Outcome : Tercapainya kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan aplikasi/software resmi untuk peningkatan pelayanan publik di Prov. Kaltim terlaksana 92,50%

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
Output : Terlaksananya kegiatan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses masyarakat 1 tahun
Outcome : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat terlaksana 97,30%

Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika.

- Pengembangan/pembenahan aplikasi website SKPD di Prov. Kaltim.
Output : Tersedianya website di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Timur
Outcome : Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi melalui website kepada masyarakat terlaksana 93,53%

Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika.

- Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Pemingkatan E Govt.
Output : Terlaksananya pemingkatan e Government dan koordinasi pada tingkat nasional/daerah 1 tahun
Outcome : Tercapainya tata kelola pemerintahan melalui sistem elektronik (E Government) dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terlaksana 83,80%.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo.

- Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim.
Output : Terlaksananya pembinaan/penertiban perusahaan jasa titipan Kab/Kota di wilayah Kaltim



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Outcome : Meningkatnya Perusahaan Jasa Titipan yang Memiliki Izin di Wilayah Kaltim terlaksana 83,19%

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim.

Output : Terlaksananya Monitoring USO Kab/Kota di wilayah Kaltim 1 tahun

Outcome : Persentase meningkatnya Pemanfaatan USO di Kab/Kota di wilayah Kaltim terlaksana 95,83%

- Rapat Teknis / Koordinasi Bidang Postel di Dalam dan Luar Negeri.

Output : Terlaksananya Rapat Teknis/Koordinasi Bidang Postel dengan Kab/Kota di wilayah Kaltim dan diluar Provinsi Kaltim 14 kab/kota

Outcome : Adanya keseragaman tugas dan fungsi bidang postel dengan Kab/Kota di wilayah Kaltim dan Provinsi se Indonesia terlaksana 91,30%

- Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi.

Output : Terlaksananya sosialisasi peraturan telekomunikasi di wilayah Kaltim 1 kegiatan

Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg peraturan telekomunikasi terlaksana 64,76%

- Sosialisasi filateli.

Output : Terlaksananya sosialisasi filateli di wilayah Kaltim 1 kegiatan

Outcome : Meningkatnya minat pelajar dalam berfilateli terlaksana 91,59%

Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah.

- Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota.

Output : Terlaksananya Koordinasi Bidang Kominfo 1 kegiatan

Outcome : Terciptanya Kesepahaman / Sinergitas Antar Lembaga Terkait terlaksana 86,11%

- Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah.

Output : Tersedianya Informasi yang Dihasilkan Oleh Media Center 500 kegiatan

Outcome : Menjadikan Media Center sebagai Pusat Layanan Informasi terlaksana 96,98%

- Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik pada SKPD.

Output : Tersedianya informasi data dan dokumentasi SKPD 52 SKPD

Outcome : Data dan informasi yang lebih akurat kepada publik terlaksana 99,34%

Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika.

- Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.
Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan Leaflet, Shopping Bag, Buku Kerja, Kalender Meja, Baliho dan Spanduk 1 tahun
Outcome : Memudahkan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah terlaksana 99,55%
- Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi.
Output : Dialog Interaktif di TVRI Kaltim dan RRI Samarinda 96 kegiatan
Outcome : Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah terlaksana 90,68%
- Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah.
Output : Inventarisasi data SKPD, instansi vertical dan non lembaga pemerintah, pengolahan data sebagai bahan informasi.
Outcome : Data dan informasi lebih akurat terlaksana 60,25%
- Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD.
Output : Terlaksananya pendokumentasian Buku Laporan dan Foto Kegiatan 240 kegiatan
Outcome : Terdokumentasikannya Kegiatan SKPD sesuai dengan Tupoksi terlaksana 99,44%
- Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah.
Output : Peran Serta dalam Kegiatan Pameran 5 kegiatan
Outcome : Terpublikasikannya Kinerja Pemerintah maupun Diskominfo Provinsi Kaltim terlaksana 96,05%
- Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Informasi Daerah Prov. Kaltim.
Output : Operasional Komisi Informasi Daerah Prov. Kaltim 14 kab/kota
Outcome : Sengketa informasi dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku terlaksana 97,20%

Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel.

- Monitoring menara telekomunikasi.
Output : Terlaksananya monitoring menara telekomunikasi wilayah Kaltim 1 tahun
Outcome : Data menara telekomunikasi di Wilayah Kaltim terlaksana 98,10%
- Pembinaan/ penertiban penyelenggara televisi siaran dan berlangganan.



Output : Terlaksananya pembinaan/penertiban penyelenggara penyiaran Kab/Kota di wilayah Kaltim 1 tahun

Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Penyiaran yang Memiliki Izin di Wilayah Kaltim terlaksana 58,30%

Program Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

- Pembangunan Tower di 7 kabupaten.

Output : Pembangunan menara telekomunikasi di 7 kabupaten

Outcome : Jumlah Jangkauan coverage area menara telekomunikasi terlaksana 96,54%

Program Integrasi Aplikasi

- Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi.

Output : Meningkatnya aplikasi terintegrasi system informasi

Outcome : Meningkatnya jumlah interoperabilitas system informasi terlaksana 97,13%

Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa

- Sosialisasi dan pendayagunaan pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Output : Meningkatnya peserta sosialisasi dan pendayagunaan layanan pengadaan secara elektronik

Outcome : Persentase pendayagunaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) terlaksana 83,82%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Output : Tersedianya aparatur manajemen pengelolaan keuangan daerah 1 tahun

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen pengelolaan keuangan daerah terlaksana 94,93%

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tidak ada karena sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika No. 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam Tahun Anggaran 2015 mendapat anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 32.076.980.300,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan anggaran APBD-P Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 3.715.776.046,86 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah Koma Delapan Puluh Enam Sen) sehingga total keseluruhan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim adalah Rp. 35.792.756.346,86 (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Koma Delapan Puluh Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut :

SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Anggaran	Realisasi	(%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
Dinas Komunikasi dan Informatika	6,753,782,525,86	3,019,400,000	23,158,339,821	2,861,234,000	35,792,756,346,86	33,045,625,597	92.33

Adapun realisasi anggaran yang dialokasikan melalui dana APBD-P Provinsi Kaltim sampai tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 33.045.625.597.- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian realisasi fisik sebesar 92,41% dan realisasi keuangan sebesar 92.33%.

D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dijabarkan pada Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.



E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur maka tiap tahunnya dianggarkan pemeliharaan dan rehap kecil secara bertahap serta pengadaan kelengkapan peralatan dalam mendukung operasional kegiatan.

F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka melaksanakan tugas penataan organisasi, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2014 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Pada pembangunan menara telekomunikasi masih ada kendala administrasi dan teknis jadi mengalami keterlambatan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan seperti yang diharapkan untuk itu tahun berikutnya perencanaan harus dilakukan lebih matang dan pelaksanaan pekerjaan harus sesegera mungkin serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait harus lebih ditingkatkan.
- b. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dan mekanisme pelayanan publik sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota, dikarenakan beberapa daerah belum berdiri SKPD yang secara khusus menangani bidang komunikasi dan Informasi
- c. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- d. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim
- e. Selain itu tenaga staf pelaksana yang ada pada Dinas Kominfo masih terbatas seperti : Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikasi, Panitia Pemeriksa Barang, Pembuat Dokumen dan staf tenaga teknis yang berstatus PNS serta keterbatasan tenaga pelaksana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai, yang secara bertahap tiap tahunnya akan terus dilengkapi.





BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mendapatkan dana Dekonsentrasi dari pusat, yang dilakukan adalah koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh pusat untuk daerah. Koordinasi yang dilakukan diantaranya masalah kegiatan :

- a. PLIK
- b. MPLIK
- c. Desa PINTER
- d. Desa Berdering
- e. Penyelenggaraan Jasa Titipan
- f. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi.



BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah selain itu juga merumuskan perencanaan, pembinaan, pengendalian di bidang komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan seperti tersebut di atas, pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah dengan melakukan MoU dengan pihak lainnya yaitu :

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP TVRI Kaltim Nomor : 119/2961/BPPWK.A/V/2015 dan Nomor : 17/SPK/TVRI/2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui LPP TVRI Kaltim Tahun Anggaran 2015. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Kepala Stasiun TVRI Kaltim selaku pihak kedua. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kerjasama publikasi kegiatan Pemprov. Kaltim melalui LPP TVRI Kalimantan Timur dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP RRI Samarinda Nomor : 119/2962/BPPWK.A/V/2015 dan Nomor : 823/DU/05/2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui LPP-RRI Samarinda. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Kepala Stasiun RRI Samarinda selaku pihak kedua. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi



kerjasama publikasi kegiatan Pemprov. Kaltim melalui LPP RRI Samarinda dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- c. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim dengan Komando Daerah Militer VI/ Mulawarman Nomor : 119/888/BPPWK.A/II/2015 dan Nomor : B/844/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Beserta Sarana Pendukungnya. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman selaku pihak kedua. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan 1 (satu) menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya di di Kampung Merasa Kec. Kelai Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 berjalan dengan baik dengan dukungan dana APBD dan APBD-P Provinsi namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2015 untuk keuangan sebesar Rp. 33.045.625.597.-. dengan realisasi keuangan sebesar 92,33% dan realisasi fisik 92,41%.

Dalam hal tingkat capaian kinerja yang tidak mencapai 100%, dikarenakan terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, di samping itu terbatasnya waktu pelaksanaan serta dukungan sumber daya manusia.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan jadwal program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pergeseran waktu yang nantinya akan mengganggu jadwal kegiatan berikutnya.
2. Dilakukan evaluasi kegiatan secara berkala, sehingga dapat diketahui program kerja yang menjadi prioritas dan perlu mendapatkan akselerasi.
3. Dalam pembangunan menara telekomunikasi harus dilakukan perencanaan secara cermat dikarenakan banyaknya kendala teknis dan kendala lainnya yang dihadapi.
4. Penyediaan sumber daya aparatur yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.